

## **Penerapan Sistem Akuntabilitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang**

**Mumtaz Muhammad Naufal<sup>1</sup>, Laylan Syafina<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1</sup>nauvalnauval1106@gmail.com, <sup>2</sup>laylansyafina@uinsu.ac.id

### **Abstract**

*Implementation of an accountability system in preparing financial reports on agency performance refers to the use of a series of procedures and policies to ensure that all stages in the process of preparing financial reports are carried out to high and measurable standards. This research aims to determine and analyze the application of the accountability system in preparing performance financial reports for the regional secretariat of the Deli Serdang Regent's Office and to determine the inhibiting factors in implementing the accountability system in preparing performance financial reports at the regional secretariat of the Deli Serdang Regent's Office. The data collection methods are observation, interviews and documentation. The research results show that the implementation of this system has significantly increased transparency and accuracy in preparing financial performance reports. A well-documented process makes auditing and verification easier, so that the information presented in the report is more complete and clear. Factors inhibiting the implementation of an accountability system in preparing financial reports include a lack of human resources trained in financial accountability, especially in timely financial management and reporting, as well as inadequate technological infrastructure.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Financial Reports.*

### **Abstrak**

Penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan kinerja instansi mengacu pada penggunaan serangkaian prosedur dan kebijakan untuk memastikan bahwa semua tahapan dalam proses penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan standar yang tinggi dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan kinerja instansi sekretariat daerah Kantor Bupati Deli Serdang dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan kinerja di sekretariat daerah Kantor Bupati Deli Serdang. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sistem ini telah secara signifikan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Proses yang terdokumentasi dengan baik mempermudah audit dan verifikasi, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan lebih lengkap dan jelas. Faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan berupa kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntabilitas keuangan, terutama dalam manajemen dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, serta infrastruktur teknologi yang kurang memadai.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan.

### **1. PENDAHULUAN**

Organisasi adalah kumpulan yang membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi publik diciptakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi pimpinan publik. Berhasil tidaknya organisasi publik mencapai tujuannya, tergantung sejauh mana para pegawai pemerintahan mengatur dan mengurusnya, agar mampu menampilkan hasil kerja

sebaik mungkin, apapun jabatannya dan keahliannya serta jabatan yang dipegangnya dalam memberikan pelayanan publik [1]. Efektivitas kerja pegawai dalam organisasi menurut Mangkunegara menentukan serta membentuk efektivitas kerja organisasi. Setiap pegawai dalam organisasi manapun dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik agar tujuan organisasi tercapai. Kinerja pegawai tidak muncul dengan sendirinya, tetapi memiliki keterkaitan dengan kemampuan kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. [2]

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Demi terciptanya hal itu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik. Pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat [3]. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia seringkali menghadapi berbagai permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi.

Namun yang terjadi sampai saat ini tidak adanya keterbukaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset kab. Deli Serdang kepada masyarakat atas pertanggung jawaban hasil laporan keuangan yang telah dilaksanakan baik melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi maupun website (internet) pemerintah, yang terlampir dalam website resmi. Di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang, fenomena ini tercermin dari sejumlah temuan audit yang menunjukkan adanya tidak akuratan dalam laporan keuangan kinerja. Tidak akuratan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan staf dalam menerapkan sistem akuntabilitas, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses pelaporan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar unit kerja yang menghambat integrasi data keuangan yang akurat dan tepat waktu. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem akuntabilitas guna meningkatkan kualitas laporan keuangan kinerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pentingnya penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan kinerja di instansi pemerintah, khususnya di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang. Dalam era transparansi dan tata kelola yang baik, setiap instansi pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengelola anggaran dengan efektif, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik secara akurat dan tepat waktu. Namun, meskipun ada upaya signifikan untuk menerapkan sistem akuntabilitas, berbagai tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur teknologi yang belum memadai masih menjadi kendala yang menghambat efisiensi dan keakuratan dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem akuntabilitas guna meningkatkan kualitas laporan keuangan kinerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan kinerja di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang, peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai efektivitas sistem ini dengan mengambil judul penelitian "Penerapan Sistem Akuntabilitas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang".

## 1.1. Landasan Teori

### 1.1.1. Laporan Keuangan

Menurut PP No 71 Tahun 2010 kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dapat dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya [4]. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. [5]

Menurut Kasmir Laporan keuangan merupakan laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang terjadi saat ini atau periode yang akan datang. Laporan keuangan terdiri dari neraca dan suatu perhitungan laba rugi dari hasil operasi perusahaan

dengan laporan yang berkaitan dengan perubahan ekuitas pada suatu Perusahaan [6]. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk manajemen melakukan pertanggungjawaban kinerja ekonomi perusahaan kepada para investor, kreditor, dan pemerintah [7]. Catatan keuangan dapat berguna sebagai alat pengambil keputusan, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan usaha untuk mendapatkan bantuan atau tambahan modal dari pihak lain. [8]

#### 1.1.2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari lagi. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa [9]. Akuntansi pemerintahan biasanya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya, sebagaimana didalam akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintahan juga terdapat unsur akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. [10]

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kualitatif yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, artinya penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan suatu obyek yang diteliti secara apa adanya dan bukan dalam bentuk angka [11]. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Jenis data yang dipakai dalam analisis penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung terhadap obyek penelitian melalui panca indera inilah yang dimaksud dengan istilah "pengamatan". [12] Teknik pengumpulan data selanjutnya menggunakan metode wawancara. Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada staff Kantor Bupati Deli Serdang.

Dalam pengolahan data atau dalam proses analisis, penyusunan terlebih dahulu yaitu penyajian data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dilakukan interpretasi dan interpretasi data dengan mengacu pada referensi teoritis terhadap masalah penelitian. [13] Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data. Reduksi data untuk proses seleksi, penyederhanaan, dan klasifikasi, yang berlangsung terus menerus, merupakan langkah-langkah dalam proses pengolahan dan analisis data. Penyajian data untuk tindakan dan verifikasi agar sepenuhnya menjelaskan pola dan konfigurasi dan menarik kesimpulan dari mereka. [14]

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai media atau alat bagi organisasi sektor publik untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. [15] Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. [16]

Penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas yang baik tidak hanya meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tepat waktu. Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang telah berupaya menerapkan sistem

akuntabilitas yang komprehensif guna meningkatkan kualitas laporan keuangan kinerja mereka. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam penyusunan laporan keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, mengikuti prosedur yang standar dan terukur

*“Sistem akuntabilitas diterapkan melalui serangkaian prosedur standar yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kinerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Proses ini diawasi oleh tim audit internal yang memastikan semua langkah dilakukan dengan benar dan sesuai jadwal. Selain itu, pelatihan rutin diadakan untuk meningkatkan pemahaman staf mengenai pentingnya akuntabilitas dalam laporan keuangan”.*

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi sistem akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan integritas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta pengawasan ketat oleh tim audit internal, telah membantu memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan tepat dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, upaya kontinu dalam meningkatkan pemahaman staf melalui pelatihan rutin juga memperkuat kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam memastikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya bagi semua pemangku kepentingan.

Transparansi dalam penyusunan laporan keuangan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan yang efektif di lingkungan pemerintahan. Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat dalam proses penyusunan laporan keuangan kinerja mereka. Dengan penerapan sistem ini, setiap langkah dalam proses penyusunan laporan terdokumentasi dengan baik, memudahkan proses audit dan verifikasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih lengkap dan jelas, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami kondisi keuangan instansi dengan lebih baik.

*“Sistem akuntabilitas yang diterapkan di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang secara signifikan meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Setiap langkah dalam proses penyusunan laporan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan untuk melakukan audit dan verifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan juga lebih lengkap dan jelas, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan instansi dengan lebih baik”.*

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang telah membawa dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan kinerja. Proses yang terdokumentasi dengan baik memudahkan proses audit dan verifikasi, menjadikan setiap informasi yang disajikan dalam laporan lebih lengkap dan jelas. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan instansi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah dan juga berdampak pada penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja. Selain itu, sistem ini dapat membantu dalam mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai imbalan atas dihabiskannya anggaran dan adanya umpan balik atas kegagalan pencapaian guna perbaikan strategi dimasa yang akan datang. [17]

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang diterapkan sebagai alat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, yang berdampak langsung pada penyusunan anggaran berbasis kinerja. Implementasi sistem ini memungkinkan pemerintah mengukur keberhasilan atau kegagalan program serta kegiatan dengan evaluasi capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai imbalan atas penggunaan anggaran, sekaligus memberikan umpan balik atas kegagalan untuk perbaikan strategi di masa depan.

Hasil analisis dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa sistem ini telah secara signifikan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang. Setiap langkah dalam proses penyusunan laporan keuangan terdokumentasi dengan baik, memudahkan proses audit dan verifikasi. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam laporan menjadi lebih lengkap dan jelas, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan instansi.

Keberhasilan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang mencerminkan komitmen yang kuat terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, langkah-langkah strategis yang diambil oleh instansi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola keuangan dilakukan secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem ini telah secara signifikan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Proses yang terdokumentasi dengan baik mempermudah audit dan verifikasi, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan lebih lengkap dan jelas. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan instansi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan secara menyeluruh, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.2. Faktor Penghambat Penerapan Sistem Akuntabilitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang

Untuk mendorong kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipandang perlu dilakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah menerapkan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Melalui evaluasi juga kinerja organisasi dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. [18]

Penerapan sistem akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam transparansi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Namun, proses ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam hal akuntabilitas keuangan. Berikut hasil wawancara dengan salah satu staff kantor Bupati Deli Serdang.

*“Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam hal akuntabilitas keuangan, terutama dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu. Infrastruktur teknologi yang kurang memadai juga menjadi faktor penghambat, sehingga memperlambat proses pengumpulan dan analisis data keuangan”.*

Dalam hasil wawancara, terungkap bahwa kendala utama yang dihadapi di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntabilitas keuangan, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tepat waktu. Selain itu, infrastruktur teknologi yang kurang memadai juga menjadi faktor penghambat, yang mengakibatkan perlambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data keuangan yang diperlukan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif serta peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi guna mendukung efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan di masa mendatang.

Faktor penghambat dalam penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sering kali menyulitkan proses pelaksanaan dan dapat mengakibatkan berbagai tantangan. Dalam konteks ini, kendala-kendala tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta ketidakmampuan

dalam memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara mengenai dampak kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan.

*“Kendala-kendala tersebut dapat berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan kinerja serta potensialnya terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan dalam pelaporan. Hal ini bisa mempengaruhi transparansi dan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang disajikan”.*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur teknologi yang tidak memadai memiliki dampak signifikan terhadap proses penyusunan laporan keuangan kinerja di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang. Kendala-kendala ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan dalam pelaporan. Akibatnya, transparansi dan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tersebut dapat terganggu, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kredibilitas pengelolaan keuangan pemerintah di mata masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi tahunan atas sistem tersebut menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah berhasil menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan untuk mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui evaluasi, pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan misi dapat diketahui dan dipelajari, sehingga memungkinkan perbaikan program atau kegiatan di masa mendatang.

Penerapan sistem akuntabilitas di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam transparansi laporan keuangan kinerja. Namun, proses ini tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang akuntabilitas keuangan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan staf kantor yang menyebutkan bahwa kendala utama adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur teknologi yang belum memadai, yang menghambat pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu.

Kendala-kendala tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan potensi terjadinya kesalahan atau ketidakakuratan dalam pelaporan. Keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan kinerja dapat memengaruhi transparansi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam aspek sumber daya manusia dan teknologi untuk memastikan bahwa sistem akuntabilitas berjalan dengan efektif.

Dalam menghadapi tantangan ini, Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan mengalokasikan lebih banyak investasi untuk memperkuat infrastruktur teknologi. Dengan demikian, efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem akuntabilitas secara keseluruhan dan memastikan bahwa laporan keuangan kinerja disusun dengan standar yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara terkait faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam meningkatkan transparansi, tantangan yang dihadapi tidak bisa diabaikan. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntabilitas keuangan, terutama dalam manajemen dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, serta infrastruktur teknologi yang kurang memadai menjadi hambatan utama. Kendala-kendala ini berpotensi memperlambat proses pengumpulan dan analisis data keuangan yang diperlukan, dengan dampak potensial berupa keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan kinerja dan risiko kesalahan atau ketidakakuratan dalam pelaporan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Implementasi sistem ini telah secara signifikan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan kinerja. Proses yang terdokumentasi dengan baik mempermudah audit dan verifikasi, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan lebih lengkap dan jelas. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan instansi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan secara menyeluruh.

Faktor penghambat penerapan sistem akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan berupa kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam akuntabilitas keuangan, terutama dalam manajemen dan pelaporan keuangan yang tepat waktu, serta infrastruktur teknologi yang kurang memadai.

#### REFERENCES

- [1] A. U. R. Muh. Yunan Pagala, "Penerapan Kepemimpinan Birokratis Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara," *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 2, pp. 154-164, 2022.
- [2] Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [3] R. A. Pasaribu, *Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Deli Serdang, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.*
- [4] M. N. Ahmad Andy Adinegara, "Analysis of the Role of Internal Audit Implementation in Improving the Quality of Financial Statements Sumedang Regency Government (Case Studies on Sumedang Regency Government)," *Journal of Business, Accounting and Finance*, vol. 5, no. 1, pp. 1-5, 2021.
- [5] Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Grasindo, 2018.
- [6] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- [7] W. Albra, *Usaha Kecil & Kewirausahaan : Pola Pikir, Pengetahuan, Keterampilan*, Madenatera, 2019.
- [8] F. N. Cindy Ariesta, "Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Neraca Berbasis SAK-ETAP Pada UMKM (Studi Kasus Pada Elden Coffee & Eatery)," *Jurnal Akuntansi*, vol. 9, no. 2, pp. 194-202, 2020. <https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/1076/>
- [9] P. C. A. A. B. I. Y. Arulampalam Kunaraj, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan)," *Journal of Engineering Research*, vol. 3, no. 4, pp. 2692 - 2700, 2023.
- [10] E. H. T. B. K. Jusmani, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir," *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, vol. 4, no. 2, pp. 199 - 212, 2022. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862>
- [11] L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- [12] S. A. Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Kencana, 2019.
- [13] M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2017.
- [14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2019.
- [15] J. J. T. S. J. T. Siti Aisyah Sukarno, "Pengaruh Kompetensi Aparat dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara)," *Indonesia Accounting Journal*, vol. 2, no. 2, p. 110, 2020. <https://doi.org/10.32400/iaj.27981>

- [16] Y. P. B. A. Toyo, "PERENCANAAN STRATEGIS BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI BARAT," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIMAP)*, vol. 1, no. 1, pp. 1 - 11, 2022.
- [17] H. S. M. Y. B. K. Desni T. Sinaepon, "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan PP RI Nomor 29 Tahun 2014 Pada Pengadilan Militer III-17 Manado," *Jurnal EMBA*, vol. 10, no. 4, pp. 50 - 61, 2022.
- [18] E. M. E. J. R. K. Jembris T. Mangar, "Manajemen Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 7, no. 100, pp. 33 - 42, 2021.
- [19] S. Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- [20] A. R. Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.